PERISTIWA *KENTONG GOBYOK*: DI ANTARA MENGINGAT SEKALIGUS MELUPAKAN KEKERASAN 1965 DI KLATEN, JAWA TENGAH

Kuncoro Hadi

Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta
hkuncoro@uny.ac.id

F.X. Domini B.B. Hera

Pusat Studi Budaya dan Laman Batas Universitas Brawijaya Malang
francis_x_hera@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kajian ini berfokus pada ingatan sekaligus pelupaan dari peristiwa kentong gobyok, sebuah kekerasan pasca G30S 1965 di Klaten. Peristiwa tersebut menjadi penanda memori di antara pihak-pihak yang berseteru pada masa itu, yakni eks tapol dan Pemuda Marhaen yang mengikuti rivalitas dari kedua partai afiliasi mereka di Klaten, yakni PKI dan PNI. Kajian ini memiliki tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana kronologi peristiwa kentong gobyok terjadi di antara semua pihak yang terkait? Kedua, sejauh mana pembelahan ingatan pasca peristiwa kentong gobyok? Ketiga, mengapa ada memori yang diingat sekaligus dilupakan oleh masing-masing pihak yang dahulu pernah berseteru? Kajian ini menggunakan teknik penelitian sejarah dengan memanfaatkan sumber sejarah dan wawancara dengan para pelaku peristiwa maupun saksi mata yang terlibat. Kajian ini berguna untuk memperkaya studi sejarah dan politik memori pada studi kekerasan 1965 yang menjadi ujian sejarah bagi bangsa Indonesia. Memahami aspek kejadian pada waktu peristiwa berlangsung, pembelahan memori hingga rekonsiliasi yang memiliki tumpang tindih ingatan menjadi kunci untuk mengurai kompleksitas trauma dan membuka peluang daya penyembuh luka batin bagi mereka yang telah terstigma.

***Kata kunci**: kentong gobyok, kekerasan 1965, politik memori*

ABSTRACT

This study focuses on the memory and the forgetting of "kentong gobyok" incident, a post- G30S 1965 political violence in Klaten; this incident is named after a Javanese traditional alarm system that uses slit drums known as "kentong gobyok". The tragedy became a marker of memory between the warring parties, i.e. the former communist political prisoners and former Pemuda Marhaen (nationalist youth) members, who followed the rivalries of their two affiliated parties in Klaten, the PKI (Indonesian Communist Party) and PNI (Indonesian Nationalist Party). This study has three research questions. First, how is the chronology of "kentong gobyok" incident from the perspectives of the parties involved? Second, how far is the memory cleavage that appeared after the incident? Third, why is there particular memory that is both remembered and forgotten by each of the concerned

parties? This study uses historical research techniques by utilizing historical sources and interviews with the perpetrators of the incident and the eyewitnesses involved. The research is useful to enrich the study of history and political memory in the 1965 violence, which has become a touchstone for Indonesian nation. Understanding the aspects of the tragedy at the time it took place, the memory cleavage, and the reconciliation with overlapping memories is the key to unravel the complexity of the trauma and open up opportunities for trauma healing for those who have been stigmatized.

Keywords: kentong gobyok, *political violence of 1965*, *politics of memory*

PENGANTAR

Bunyi suara kentungan yang dipukul terus menerus umumnya dipahami sebagai tanda adanya peristiwa kegemparan, terutama jika muncul tindak pencurian atau perampokan di malam hari. Tetapi suara kentungan yang saling bersahutan (*kentong gobyok*) di malam hari pada minggu akhir bulan Oktober 1965 di sepanjang jalan Jogja-Solo yang berlangsung dari wilayah barat Klaten (Prambanan) hingga wilayah timur Klaten (Delanggu) dimaknai lain. Ingatan-ingatan tentang peristiwa itu juga bisa berbeda dan saling berlawanan.

Peristiwa yang berlangsung lebih dari 50 tahun lalu itu masih hidup dalam ingatan-ingatan orang-orang yang secara sosial terkait dengan peristiwa itu sebagai sebuah *living memory,* yakni ingatan yang hidup dalam memori masyarakat yang secara sosial terkait dengan peristiwa itu. Tetapi hingga masa sekarang, tidak banyak lagi ingatan tentang suara kentungan itu sebagai penanda atas sebuah peristiwa kerusuhan yang disertai pembunuhan. Tidak ada pewarisan ingatan atas peristiwa tersebut, jika pun ada, hanya dalam tingkat yang terbatas. Suara kentungan bersahutan kembali hanya dimaknai secara kultural dan jika ingatan-ingatan kolektif masyarakat Klaten dilekatkan dengan sebuah kerusuhan di sepanjang Jalan Jogja-Solo, maka rujukan yang muncul ke permukaan adalah ingatan tentang kerusuhan-kerusuhan sepanjang jalan yang terjadi pada Oktober 1999.

Kentong gobyok menjadi satu situs ingatan (*the site of memory*) orang-orang yang saling berseteru pada masa akhir kekuasan Soekarno di tingkat lokal, di wilayah Klaten. Lalu selepas peristiwa kelam 65 itu terjadi, ingatan yang terus hidup (*living memory)*—yang berbeda dan bahkan bertentangan—ini terus disimpan sekaligus ada usaha untuk ”didamaikan”. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana peristiwa kekerasan *kentong gobyok* terjadi, pembelahan ingatan yang muncul selepas peristiwa itu serta dalam lingkup kecil dan personal bagaimana rekonsiliasi kultural dilakukan dengan pelupaan diam-diam yang dilakukan oleh orang yang—baik langsung maupun tidak langsung—memiliki keterkaitan dengan peristiwa itu.

PERISTIWA *KENTONG GOBYOK* DAN HADIRNYA KEKERASAN

Di wilayah Klaten ada satu *gegeran* yang terjadi pasca peristiwa 1 Oktober 1965 yang bersifat lokal dan memunculkan kekerasan. Malam 22 Oktober 1965 hingga dini hari 23 Oktober 1965, suasana di beberapa wilayah Klaten berubah mencekam. Kondisi ini tidak lepas dari reaksi-reaksi yang muncul akibat kisruh politik di pusat dalam peristiwa G30S. Di Klaten, pimpinan PKI (Partai Komunis Indonesia) beserta ormas-ormas kiri turut

datang saat Panca Tunggal menggelar rapat bersama Front Nasional pada 1 Oktober 1965. Rapat ini menyepakati bahwa pemerintah daerah Kabupaten Klaten tidak membenarkan Gerakan 30 September beserta Dewan Revolusi dan berdiri di belakang Presiden Soekarno.

Perwakilan PKI serta ormas-ormas kiri tidak bereaksi berlebihan dalam rapat itu sebelum akhirnya pada 3 Oktober 1965 mereka mengambil sikap mendukung Dewan Revolusi. Sebuah apel akbar IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia)—meski tidak semua anggotanya seluruh Kabupaten Klaten terlibat dalam pawai ini—, yang juga diikuti PPI Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia), digelar di Klaten dan dihadiri oleh tokoh-tokoh CS (Comite Seksi) PKI dan ormas-ormas kiri lainnya. Apel ini kemudian berlanjut menjadi aksi pawai. Mereka meneriakkan yel-yel "dukung Gerakan 30 September", "dukung Dewan Revolusi", "ganjang Dewan Djenderal dan antek2nja". Mereka juga membuat corat-coret karikatural di tembok-tembok kota dengan penggambaran yang sama. Massa bahkan bernyanyi mengejek Dewan Jenderal (Salinan "Laporan Chronologis Peristiwa Gerakan 30 September di Daerah Tingkat II Klaten", 8 November 1965; Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, 1982: 54, *Kompas* 27 Oktober 1965, Rasono, wawancara, 2016).

Pada 5 Oktober 1965, PKI Jawa Tengah mengeluarkan pernyataan dukungan tanpa syarat kepada Presiden Soekarno, mendorong persatuan nasional dan berusaha menenangkan Angkatan Darat dengan melakukan kegiatan senormal mungkin. Lima hari berikutnya, 10 Oktober 1965, CS PKI Klaten mengikuti dengan membuat pernyataan yang sama dan dikirim langsung pada Presiden Soekarno (Anderson dan McVey, 2001: 141) serta menegaskan bahwa "peristiwa Gerakan 30 September adalah persoalan intern Angkatan Darat" (Salinan "Laporan Chronologis Peristiwa Gerakan 30 September di Daerah Tingkat II Klaten", 8 November 1965). Pernyataan-pernyataan itu tidak mempengaruhi keadaan menjadi lebih baik. Brigjen Soerjosumpeno selaku Panglima Kodam VII Diponegoro sekaligus Pepelrada Jateng mengeluarkan Surat Keputusan pembekuan "semua kegiatan PKI, Baperki beserta Ormas-ormasnja didaerah Djateng" pada 20 (serta tanggal 25) Oktober 1965 (Pusat Penerangan Angkatan Darat, 1965: 288).

Dalam pertemuan antara pimpinan PKI dengan pemerintah daerah Klaten dan pihak kepolisian, pimpinan PKI bereaksi ketika pihak Kepolisian Resor Klaten membicarakan soal pembekuan parpol dan ormas di Klaten sebagai tindak lanjut dari surat keputusan Panglima Kodam VII Diponegoro. Mereka menyatakan "presiden sadja tidak berani membekukan PKI, kok instansi berani membekukan" (Salinan "Bahan Dokumentasi" guna memenuhi permintaan Komando Resor Militer 72 Pamungkas Sedjarah Militer Surakarta, 15 November 1965). CS PKI Klaten merasa bahwa tindakan pembekuan ini—yang ditujukan kepada PKI beserta ormas-ormas afiliasinya—merupakan upaya pelumpuhan elemen-elemen kiri dan karena itulah mereka menentangnya.

Seiring dengan kedatangan pasukan AD (Angkatan Darat) yang dikirim dari pusat (RPKAD serta Yon F Brigif 4), ketegangan menjadi semakin meningkat. Langkah-langkah perlawanan telah dipersiapkan oleh orang-orang komunis, terutama Pemuda Rakyat. Aksi dimulai dengan gerakan pemogokan, diteruskan dengan sabotase hingga aksi pengganyangan. Aksi pemogokan merupakan aksi pertama yang dilakukan sebagai bentuk protes pembekuan PKI dan ormas-ormas terkait. Pemogokan-pemogokan buruh terjadi di Pabrik Gula Gondang Baru

(Gondangwinangun), Perusahaan Tembakau Kebonarum, PPN (Pusat Perkebunan Negara) Tembakau Gayamprit, Pabrik Gula Ceper dan Stasiun Kereta Api Ceper, Pabrik Karung Delanggu dan Bapora Pedan pada 21 Oktober 1965 (Salinan "Bahan Dokumentasi" guna memenuhi permintaan Komando Resor Militer 72 Pamungkas Sedjarah Militer Surakarta, 15 November 1965; Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, 1975: 54-55). Pada Jumat siang 22 Oktober 1965, CS PKI di bawah kepemimpinan Soeparman, Barto Kaumen serta Darsono telah menyingkir dan mempersiapkan massa PR (Pemuda Rakyat) untuk bergerak (Salinan "Berita Atjara Pemeriksaan Sementara terhadap dirinya Sdr Soegimin" 10 Desember 1965, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992: 158-159, Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, 1977: 585).

Pada sore hari konsentrasi inti Pemuda Rakyat ada di dekat Yon Dodikif 5 Depo Wedi. Mereka berkumpul di pertigaan Bendogantungan di utara hingga menuju ke selatan ke wilayah Depo (*Kedaulatan Rakyat*, 4 Agustus 1966; Imam Soedjono, 2006: 24-25). Mereka berkoordinasi dengan personel-personel tentara di Yon Dodikif 5 untuk mendapatkan senjata. Pemuda-pemuda lain dipersiapkan di beberapa titik. Sepuluh truk berisi anggota Pemuda Rakyat didrop di beberapa tempat di wilayah Klaten (*Sinar Harapan*, 15 November 1965). Sementara iring-iringan 4 buah truk penuh Pemuda Rakyat bersenjata tajam bergerak dari Ceper menuju ke Markas Yon Dodikif 5 Depo. Mereka ini bagian dari kesatuan inti yang akan turut menerima pembagian senjata. Satu truk berisi 42 Pemuda Rakyat berhasil dihentikan polisi dan digiring ke Kantor Polisi Resor Klaten (Salinan "Laporan Chronologis Peristiwa Gerakan 30 September di Daerah Tingkat II Klaten", 8 November 1965). Mendapatkan senjata—yang kewajibannya dibebankan oleh satuan kompi senjata—sangat penting artinya. Melawan pasukan-pasukan RPKAD serta Yon F (Brigif 4 Diponegoro) harus dengan senjata. Mereka juga berharap kepada satuan Yon M (Brigif 6 Diponegoro) dan Yon Dodikif 5 untuk melindungi dan bergerak bersama mereka.

Komando untuk bergerak akhirnya bergema. Pada pukul 23.00, suara kentungan dalam irama *titir* terdengar di Klaten, kurang lebih hal yang sama terjadi juga di Surakarta dan Boyolali. Pemuda Rakyat segera melakukan sabotase jalan raya di Tegalgondo dan Delanggu serta di sekitar Jalan Gondangwinangun hingga ke Prambanan. Mereka merintangi jalan dengan batu-batu dan pohon-pohon. Aksi-aksi di wilayah timur Klaten, terutama Delanggu, dikoordinir oleh seorang anggota aktif militer Angkatan Darat yang baru kembali pulang dari Bogor, Lettu Mohamad Joremi atau yang dikenal dengan nama Bodronoyo. Ia seorang tentara karismatik yang disegani karena memimpin perlawanan-perlawanan melawan tentara Belanda di wilayah Delanggu saat terjadi aksi agresi militer Belanda kedua (Sumoharto, wawancara, 2017). Sementara aksi-aksi sabotase di wilayah barat Klaten turut digerakkan oleh anggota-anggota Yon Dodikif 5 seperti Letda Slamet Bedug, Peltu Imam Soekadi, Peltu Mardjono, Sersan Djais, Kopda Soekardi, Sersan Soeradi dan Sersan Soekirno (Pusat Penerangan Angkatan Darat, 1965: 307). Mereka tentara yang berpengalaman bergerak bersama dengan massa sipil, terutama Slamet Bedug yang pernah terlibat dalam gerakan mempertahankan tanah OG (*Onderneming Ground*) Gadungan di wilayah Wedi bersama BTI (Barisan Tani Indonesia) dan elemen-elemen kiri lainnya menentang Bupati Klaten M. Pratikto.

Anggota-anggota Pemuda Rakyat yang telah menunggu, pada dini hari (pukul 03.30)

tanggal 23 Oktober 1965 bergerak menuju Yon Dodikif 5 untuk mendapatkan senjata yang telah dijanjikan. Sekalipun banyak anggota Yon yang mendukung aksi bahkan hingga Komandan Yon Dodikif, tetapi kendali atas Yon ini ada dalam genggaman tangan wakil komandannya, Mayor Soedarno. Dia telah melakukan *briefing* dengan anak buahnya dan telah mempersiapkan pertahanan Yon Dodikif 5 dari serbuan Pemuda Rakyat yang menginginkan senjata. Pemuda-pemuda rakyat akhirnya masuk ke kompleks Yon Dodikif 5 dan kebingungan saat meminta senjata untuk digunakan mengganyang "setan-setan", di mana orang-orang yang diganyang kebanyakan orang-orang PNI (Partai Nasional Indonesia). Maka yang dimaksud dengan "setan-setan" kemungkinan merujuk pada orang-orang PNI tertentu—kepada personel-personel militer di Yon Dodikif 5. Mereka akhirnya justru dipaksa untuk angkat tangan di bawah ancaman tembak di tempat (*Kedaulatan Rakyat*, 4 Agustus 1966). Sebanyak 97 orang Pemuda Rakyat akhirnya ditahan dan dikirim ke Kodim Klaten untuk pengusutan (Pusat Penerangan Angkatan Darat, 1965: 307; Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 1966; Cribb (ed), 2004: 273).

Satuan-satuan Pemuda Rakyat masih terus bergerak di tempat lain. Di Klongkangan Prambanan, para Pemuda Rakyat berpakaian hitam dengan lambang kalajengking bergerak untuk menculik Huri, seorang anggota Pemuda Marhaen. Mereka juga mengambil setidaknya tiga anggota PNI, Harjono dari Tlogo, Suwito dari desa Randusari dan Darmosenjoyo dari Desa Bajran. Mereka dibawa ke markas Pemuda Rakyat di Randusari dan Klentengan untuk "diadili". Para penculik membuat peradilan dengan hakim ketua lengkap dengan penuntut umum. Orang-orang yang diculik itu diadili karena identitas politiknya. Mereka dijatuhi hukuman mati karena mereka "kaki tangan PNI" (Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, 1982:70; Cribb (ed), 2004: 229-231). Anggota-anggota PR juga menculik seorang bernama Kamto serta seorang pegawai Kecamatan Prambanan bernama Kisno. Pembunuhan akhirnya dilakukan setidaknya kepada Kisno, Harjono, Paiban (adik Harjono) dan seorang *modin* Desa Bajran. Di wilayah Prambanan, kebanyakan yang terbunuh merupakan orang-orang PNI, sekalipun ada seorang *modin* seperti yang disebutkan di atas ikut dibunuh. Sekalipun identitas politik menjadi basis penilaian dalam aksi-aksi kekerasan itu, di Bajran—tempat di mana Darmosenjoyo tinggal—terdapat 25 orang anggota PNI (Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, 1982: 65) dan hanya Darmosenjoyo beserta keluarganya yang diculik.

Satuan kompi senjata Pemuda Rakyat juga bergerak melucuti senjata-senjata kepolisian di Manisrenggo serta dua orang lurah (Desa Tunjungsari dan Tijayan) beserta ratusan orang datang ke Kantor Kecamatan Manisrenggo dengan tujuan yang sama. Dua orang lurah itu meminta kepada camat bahwa mereka memerlukan senjata. Meski permintaan ini ditolak dan kedua lurah itu gagal menenangkan massa, senjata-senjata yang tersimpan di gudang, lengkap dengan amunisinya, berhasil diambil setelah massa mengepung, menangkap dan mengikat camat—di sisi lain, serbuan ke kecamatan dimaksudkan agar pamong kecamatan tidak melarikan diri (mengungsi) dan tetap menjalankan pemerintahan di Manisrenggo (Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, 1982: 58-59; Sunarmo, wawancara, 2008). Orang-orang Manisrenggo yang melarikan diri segera membuat tempat-tempat pengungsian di Yogyakarta, salah satunya di Desa Jambon. Di

sana terdapat 500 orang pengungsi nonkomunis yang tinggal, termasuk Camat Manisrenggo yang berhasil menyelamatkan diri. Mereka memberlakukan *screening* ketat terhadap orang-orang yang akan ikut mengungsi. Identitas politik menjadi dasar proses *screening* ini (Cribb (ed), 2004: 231).

Pembunuhan-pembunuhan juga terjadi di wilayah Jogonalan. Setidaknya dua orang yang berafiliasi dengan PNI terbunuh. Di Gondangan, Giyanto menjadi korban salah sasaran. Ia merupakan adik ipar Siswo Darsono, seorang sinder Pabrik Gula Gondang Baru sekaligus tokoh PNI Gondangan. Karena tidak menemukan Siswo Darsono, pemuda-pemuda PR yang menyerbu rumahnya di Kampung Sumberan segera menyeret Giyanto ke persawahan di barat rumah dan membunuhnya (Prayino, wawancara, 2008). Pembunuhan juga terjadi di Desa Somopuro dan menimpa Mangkuwiryono, seorang bekas Carik Somopuro serta seorang tuan tanah yang memiliki 3 sertifikat sawah dan mempratikkan sistem *ngijon*. Ia diambil dari rumahnya dan segera dibunuh (Adipurwo, wawancara, 2008).

Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang komunis juga hadir di wilayah Jatinom. Di Kampung Jerukmanis dan Sucokangsi yang didominasi oleh orang-orang komunis, pembunuhan-pembunuhan terjadi terhadap orang-orang nonkomunis. Tujuh orang nonkomunis dibunuh dalam satu aksi pengepungan kampung-kampung itu. Lima korban Kampung Jerukmanis bernama Sukadi dan Tjipto Utomo (keduanya saudara kandung) yang dibunuh di Plembangan, serta Reso Pawiro/Samidin, Wiryowagiman dan Priyoutomo. Mereka dibunuh dihari yang sama. Kelima korban ini merupakan tokoh-tokoh PNI. Di Socokangsi dan Jamprongan, dua dusun yang tak jauh dari Jerukmanis, terdapat masing-masing dua orang PNI yang terbunuh (Khadiq, 2016: 333-335). Sementara di Kelurahan Temuireng, 16 orang nonkomunis diculik. Enam orang akhirnya terbunuh dan sisanya bisa kembali pulang dengan selamat (Surat Pelaporan Mingguan Situasi Daerah Ketjamatan Djatinom kepada Bupati Kepala Daerah Klaten tertanggal 29 Desember 1965; Oei Tjoe Tat, 1995: 361). Karena aksi penculikan dan pembunuhan ini, kampung-kampung nampak mencekam. Penduduk yang ketakutan mengungsi ke wilayah timur yang masih dianggap aman, Jatinom bagian timur atau Karanganom (Khadiq, 2016: 333-335).

Sementara di wilayah Ceper, aksi-aksi pengganyangan terhadap "tujuh setan desa" direncanakan oleh CSS PKI. Soegimin Ragilsaputro, sekretaris CSS PKI Ceper memerintahkan Djojowirrat untuk melaksanakan aksi pengganyangan. Struktur pelaksana pengganyangan dibentuk. Unsur-unsur pemuda digerakkan oleh Karnosugito, S. Tribudiatmodjo, Soenarto dan Josowidodo. Semua aksi pengganyangan ini di bawah pengawasan Kapten Suwarno dari Desa Salak Kurung. Mereka yang akan diganyang merupakan orang-orang PNI yang dianggap sebagai "setan desa". Suara *titir* kentong yang terdengar pada pukul 04.00, 23 Oktober 1965 menjadi tanda gerakan pengganyangan. Sekalipun bantuan-bantuan senjata yang dijanjikan tidak terpenuhi, aksi-aksi pembakaran, penculikan dan pembunuhan dilaksanakan. Dua ribu massa Pemuda Rakyat bergerak di Ceper (Salinan Berita Atjara Pemeriksaan Sementara terhadap dirinja sdr. Soegimin tertanggal 10 Desember 1965).

Beberapa rumah seperti rumah milik Carik Sastrasaksaka, rumah Prawirasarjanta dan rumah Sastradardjana dibakar massa. Korban terbunuh dari kalangan nasionalis di Desa Jambu Kidul mencapai 12 orang. Sementara di Jambu Kulon sebanyak 3 orang

terbunuh. Mereka yang terbunuh ini hampir semua dikenal sebagai tokoh-tokoh PNI (Lestari, 2009: 94-95; *Kompas* 17 November 1965). Pengganyangan di Ceper ini lebih banyak diperuntukkan bagi mereka yang diidentifikasi sebagai orang-orang nasionalis dan tidak pada kelompok agama (Lestari, 2009: 96). Pembunuhan seorang carik juga terjadi di timur Ceper, di wilayah Pedan. Setidaknya seorang carik sekaligus bekas lurah bersama dua anaknya dibunuh dan dimasukkan dalam sumur di rumahnya sendiri (Surjaki dan Suparnoto, wawancara, 2013).

Investigasi-investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Klaten menyebutkan bahwa gerakan orang-orang komunis tidak menyeluruh di semua kecamatan. Wilayah-wilayah seperti Polanharjo, Delanggu—di mana tidak terjadi pembunuhan-pembunuhan orang-orang nonkomunis di wilayah ini–dan Wonosari tidak dalam keadaan genting seperti di wilayah-wilayah lain (wawancara dengan Sumoharto, 2016). Investigasi Pemerintah Klaten juga telah memetakan akibat-akibat kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah Klaten (Penerangan Angkatan Darat, 1965: 287, Salinan "Laporan Chronologis Peristiwa Gerakan 30 September di Daerah Tingkat II Klaten", 8 November 1965).

Korban penculikan	312
Korban pembunuhan	168
Korban penganiayaan	33
Korban hilang	22
Korban mengungsi	11.265
Rumah/bangunan terbakar	38

Pemerintah Klaten menyebutkan korban pembunuhan mencapai 168 orang, sementara Pusat Penerangan Angkatan Darat menyebut 126 orang nonkomunis terbunuh di Klaten (Pusat Penerangan Angkatan Darat, 1965: 287, Soerojo, 1988: 279). Harold Crouch—dengan mengutip laporan seorang perwira penghubung bernama Hadikusumo dalam persidangan Oetomo Ramelan—mencatat jumlah yang cukup tinggi. Orang-orang nonkomunis yang terbunuh di Klaten mencapai 238 orang. Jumlah ini paling tinggi dibanding korban pembunuhan yang dilakukan orang-orang komunis di Boyolali yang mencapai 98 orang dan di Surakarta yang mencapai 21 (Crouch, 1999: 176; Brackman, 1969: 31; Abdurrachman (pen), 2012: 486). Tidak ada angka pasti terkait jumlah korban. Tetapi sekalipun mengambil jumlah paling minimal—126 menurut catatan AD—, angka itu menunjukkan skala kekerasan di Klaten yang jauh lebih besar dibanding dengan dua wilayah yang bersinggungan dengannya, Surakarta dan Boyolali.

Laporan Bupati Klaten terkait "gerakan[2] terror dan perlawanan kepada pemerintah" tidak menyebut spesifik pergerakan Pemuda Rakyat di Kota Klaten yang menyerang pusat pemerintahan (Salinan "Laporan Chronologis Peristiwa Gerakan 30 September di Daerah Tingkat II Klaten", 8 November 1965). Pembunuhan paling banyak terjadi di wilayah Ceper. Gerakan-gerakan kekerasan—yang disebut-sebut Bupati M. Pratikto menimbulkan banyak kematian dan kerusakan—nampaknya terjadi di wilayah-wilayah pinggiran Klaten.

Pascakekerasan yang memuncak pada aksi sabotase dan serangkaian pembunuhan terhadap musuh-musuh "kaum tengah sayap kanan" dalam *kentong gobyok* itu, penggerak dan pelaku aksi justru lari dan bersembunyi (Sumoharto, wawancara, 2016), menyisakan waktu untuk penghancuran PKI beserta elemen-elemen kiri lainnya dengan masif dan terkontrol di bawah Angkatan Darat. Setidaknya sejak akhir Oktober atau awal November 1965, pembalikan kekerasan mulai

terjadi. Pembalikan ini diawali dengan pembubaran diri secara paksa terhadap PKI beserta ormas-ormas afiliasinya di wilayah Klaten. Prosesi pembubaran ini berlangsung resmi. Upacara pembubaran dihadiri pejabat pemerintah dan mereka menjadi saksi sekaligus pihak yang mengesahkan prosesi pembubaran itu (Surat Front Katulik Daerah Tingkat II Klaten, 15 November 1965). Beriringan dengan itu, pasca *kentong gobyok*, sejak akhir Oktober hingga awal November 1965 terjadi penangkapan atas 2.000 orang komunis serta yang dituduh komunis (Salinan "Laporan Chronologis Peristiwa Gerakan 30 September di Daerah tingkat II Klaten", 13 November 1965) serta hingga akhir Desember pembunuhan massal terhadap 5.000 orang-orang komunis dan yang dituduh komunis terjadi (Tat, 1995: 351).

INGATAN YANG TERBELAH

Terlepas dari kaitannya dengan kelompok militer Angkatan Darat, peristiwa kerusuhan di sepanjang jalan Jogja-Solo dan dikenal dengan peristiwa *kentong gobyok* itu setidaknya memunculkan dua kelompok yang saling berseberangan, kelompok komunis (PKI) dan kelompok nasionalis (PNI) yang anti komunis. Bagi orang-orang PNI (terutama Pemuda Marhaen) yang masih hidup hingga sekarang, ingatan tentang peristiwa *kentong gobyok* adalah ingatan tentang kerusuhan dan pembunuhan-pembunuhan orang-orang PNI yang dilakukan oleh orang-orang komunis. Tindakan ini dalam narasi resmi dianggap sebagai kudeta lokal orang-orang PKI (Samiko, wawancara, 2008, 2014). Sementara bagi eks tapol komunis, *kentong gobyok* menjadi semacam—meminjam istilah Degung Santikarma—*laad*, satu "tinggalan" atau "jejak" yang bisa mengantarkan pada interpretasi baru (Nordholt; Purwanto dan Saptari, 2008: 207) berupa ingatan tentang ketakutan-ketakutan yang mereka alami selepas *gegeran* di sepanjang jalan Jogja-Solo pada minggu terakhir Oktober 1965. Bagi mereka, *kentong gobyok* tidak lagi menjadi penanda kuat tentang kerusuhan di sepanjang jalan. Petanda tentang *kentong gobyok* telah bergeser menjadi ketakutan-ketakutan mereka dan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang komunis di beberapa wilayah di Klaten (Yanto Sumiryat dan Rasono, wawancara, 2014).

Dalam satu kesempatan wawancara, dua orang eks tapol menjelaskan bahwa *kentong gobyok*—bagi mereka—menjadi pengingat tentang bagaimana di akhir Oktober 1965 mereka harus bersembunyi di sawah-sawah setiap malam hingga akhirnya tertangkap dan masuk tempat penahanan hingga menuju ke Rowo Jombor, yang menjadi kamp kerja paksa bagi para tapol 1965. Mereka juga bercakap-cakap tentang pembunuhan-pembunuhan, tetapi bukan ingatan tentang pembunuhan di sepanjang malam penghujung Oktober 1965 itu, melainkan tentang pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang komunis yang secara sporadis terjadi di beberapa wilayah di Klaten (Barat) termasuk pembunuhan massal yang terjadi di Sungai Pandansimping (Rasono dan Slamet, wawancara, 2014).

Nampaknya ingatan tentang *kentong gobyok* merujuk pada petanda yang berbeda-beda. Orang-orang bekas Pemuda Marhaen mengingat *kentong gobyok* seperti narasi resmi pemerintah. Mereka mengingat-ingatnya sebagai "kudeta lokal" orang-orang PKI dan pembunuhan orang-orang PNI, sementara eks tapol mengingatnya sebagai penanda atas suasana ketakutan, penangkapan dan pembunuhan orang-orang komunis. Di sinilah nampak munculnya ingatan yang terbelah, di mana kelompok satu (Marhaen)

mengingat-ingat satu hal yang berbeda dengan ingatan kelompok lain (komunis) atas satu peristiwa yang sama (*kentong gobyok*) di masa lalu. Pembelahan ini nampak sistematis. Satu sisi, ingatan orang-orang Marhaen seolah melupakan penangkapan dan pembunuhan orang-orang komunis dan di sisi lain, ingatan eks tapol seolah juga melupakan tentang pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang Marhaen.

Tentu saja ingatan tentang *kentong gobyok* berhubungan dengan identitas masing-masing. Hal itu juga berhubungan dengan posisi dan relasi diri (*self*) dengan liyan (Budiawan (ed), 2013: viii-ix). Dalam konteks ini, maka entitas kolektif keduanya (baik orang-orang komunis/eks tapol maupun orang-orang Marhaen) yang saling berhadapan dan berseteru, seolah ingin mengingat sesuatu tetapi juga melupakan sesuatu. Orang-orang bekas Pemuda Marhaen ingin mengingat tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang komunis (ingatan tentang pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang Marhaen) tetapi melupakan penangkapan dan pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang komunis. Sementara para eks tapol, di posisi berseberangan, ingin mengingat tentang kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Marhaen dalam penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang komunis, sementara dalam hal yang sama, mereka melupakan pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang Marhaen dalam peristiwa *kentong gobyok*. Di sini nampak jelas bagaimana politik memori dijalankan untuk mengingat-ingat sesuatu sekaligus juga (mencoba) melupakan sesuatu. Di samping itu, ingatan—meminjam kata-kata Budiawan—melekat dengan "site". Di mana "site of memory" mengarahkan audiens pada satu jendela ke masa lalu, tetapi juga sekaligus membukakan pelbagai kemungkinan jendela masa lalu (Budiawan (ed), 2103: xii). Dengan demikian, *kentong gobyok* sebagai *laad* (*site of memory*) bisa dimaknai sebagai pengingatan tentang kerusuhan, pembunuhan orang-orang PNI, bahkan "kudeta lokal" PKI seperti narasi resmi pemerintah, tetapi sekaligus juga menjadi tanda pengingat penangkapan dan juga pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang komunis di Klaten.

REKONSILIASI KULTURAL DAN PELUPAAN (INGATAN) DIAM-DIAM

Dalam penelitian kami yang mengambil salah satu lokus di wilayah Jogonalan Klaten, beberapa narasumber wawancara yang kami wawancarai (baik eks tapol maupun eks Pemuda Marhaen), selepas reformasi, menjadi satu komunitas sebagai jemaah Gereja Kristen Jawa (GKJ). Mereka aktif dalam kegiatan keagamaan maupun sosial yang dilakukan oleh pihak gereja. Hampir setiap minggu mereka bertemu dalam *pasamuan* (kebaktian) di Gereja pepantan Sumber Bakung yang terletak di Desa Bakung Gondangan Jogonalan Klaten. Setiap akhir tahun, pada saat perayaan Natal, mereka saling mengucapkan selamat Natal. Atau setiap ada kegiatan "sepeda sehat" dan senam lansia, mereka menyatu dan saling bercengkrama.

Ingatan-ingatan tentang masa lalu, tentang *kentong gobyok*, yang dimaknai berbeda oleh mereka nampaknya telah larut menghilang. Salah satu narasumber, bekas eks tapol, masih mengingat dengan jelas bahwa salah seorang temannya di GKJ, yang dahulu merupakan anggota Pemuda Marhaen, turut terlibat penangkapan atas dirinya di Kongsi (satu kompleks hunian buruh pekerja Pabrik Gula GondangWinangun), selepas gegeran *kentong gobyok*. Tetapi mereka kemudian menjadi teman dan sering terlibat dalam kegiatan gereja. Nampaknya rekonsiliasi kultural—seperti penjelasan Sulastomo di

mana keterlibatan mereka yang pernah terlibat konflik menjalin kebersamaan dalam sebuah organisasi menjadi jalan yang lebih baik—telah berlangsung. Sepertinya dengan pendekatan budaya seperti ini dendam di antara mereka dengan sendirinya terkubur (Sulastomo, 2012).

Lalu bagaimana dengan ingatan masa lalu mereka? Mungkinkah mereka telah berdamai dengan masa lalu? Dalam satu jawaban yang singkat mereka menyatakan bahwa "biarlah masa lalu menjadi masa lalu", dalam kultur Jawa mereka menyebutnya, "sing wis yo wis". Ada endapan ingatan masa lalu yang dihilangkan (lebih tepatnya disimpan dalam tempat yang paling dalam) demi berdamai dengan masa lalu itu. Maka kemudian menjadi nampak nyata bahwa memori bergantung dengan relasi "diri" dengan "si liyan". Mereka (eks tapol dan eks Pemuda Marhaen dalam wadah GKJ) telah memiliki hubungan yang baik, maka ingatan-ingatan tentang "keburukan" si liyan dikuburkan. Eks tapol dan eks Pemuda Marhaen yang menjadi satu komunitas Kristen Jawa di Gereja Sumberbakung Jogonalan Klaten melakukan pelupaan-pelupaan tersebut, meskipun ingatan tentang masa lalu mereka berkaitan dengan peristiwa *kentong gobyok* tidak mungkin sepenuhnya (di)hilang(kan). Dalam konteks pelupaan ini, maka mereka telah melakukan apa yang disebut Paul Connerton sebagai *prescriptive forgetting* (Connerton, 2008: 59), di mana pelupaan itu seakan-akan disepakati bersama atau diam-diam mereka (berusaha) melupakan.

KESIMPULAN

Bunyi *kentong gobyok* menjadi bentang suara (*soundscape*) yang secara otomatis menjadi pintu masuk trauma memori tersendiri dari masyarakat yang mengalaminya. Bentang suara itu masih lestari dalam setiap kelompok yang dulunya berseteru dan jauh sesudahnya hidup berdampingan dengan ingatan sekaligus pelupaan yang berbeda-beda sesuai dengan latar afiliasi masing-masing kelompok sebagaimana yang ditunjukkan para eks tapol dan eks Pemuda Marhaen di Klaten. Sekalipun ingatan dan pelupaan mereka yang saling tumpang tindih di antara kedua unsur tersebut namun keduanya saling melengkapi prolog hingga epilog dari keutuhan narasi peristiwa *kentong gobyok* itu sendiri.

Pemahaman pada saat kejadian, pasca kejadian, dan memori yang mendarah daging pada setiap pelaku maupun korban membutuhkan kecermatan dengan kejelian pada studi sumber-sumber sejarah primer yang meliputinya. Hal itu dibutuhkan demi melahirkan kacamata yang presisi melihat narasi, ingatan, dan pelupaan yang terjadi di sekitarnya. Tanpa memahami kesemuanya itu, jebakan perspektif yang condong sepihak hingga penafsiran yang fatal berujung pengadilan berulang-ulang pada subyek-subyek tertentu menjadi buah-buah risiko yang menimpa para peneliti studi politik memori. *Kentong Gobyok* menjadi sebuah penanda dari bentang suara yang bernuansa trauma, di mana korban dan pelaku dari pihak-pihak yang berseteru melahirkan kompetisi memori antara satu dengan yang lain pasca peristiwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Salinan "Bahan Dokumentasi" (guna memenuhi permintaan Komando Resor Militer 72 Pamungkas Sedjarah Militer Surakarta) tertanggal 15 November 1965. Front Katulik Daerah Tingkat II Klaten. Arsip Soegijanto Padmo koleksi Ahmad Nashih Luthfi.

Salinan "Berita Atjara Pemeriksaan Sementara terhadap dirinya Sdr Soegimin" tertanggal 10 Desember 1965. Arsip Soegijanto Padmo koleksi Ahmad Nashih Luthfi.

Salinan "Kata Selamat Datang dan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten pada Penindjauan Gubernur, Pang Dam VII/Diponegoro, Pang Dak IX beserta rombongan di daerah Klaten" tertanggal 13 November 1965. Arsip Soegijanto Padmo koleksi Ahmad Nashih Luthfi.

Salinan "Laporan Chronologis Peristiwa Gerakan 30 September di Daerah tingkat II Klaten" oleh Bupati Kepala Daerah Klaten, M. Pratikto tertanggal 8 November 1965. Arsip Soegijanto Padmo koleksi Ahmad Nashih Luthfi.

Salinan Berita Atjara Pemeriksaan Sementara terhadap dirinja sdr. Soegimin tertanggal 10 Desember 1965. Arsip Soegijanto Padmo koleksi Ahmad Nashih Luthfi.

Salinan laporan "Peristiwa Djambu-Kidul Tjeper" tanpa tanggal. Arsip Soegijanto Padmo koleksi Ahmad Nashih Luthfi.

Surat Front Katulik Daerah Tingkat II Klaten tentang "Bahan Dokumentasi Sedjarah Militer" yang ditujukan kepada Komando Resor Militer 72 Pamungkas Surakarta tertanggal 15 November 1965. Arsip Soegijanto Padmo koleksi Ahmad Nashih Luthfi.

Surat Pelaporan Mingguan Situasi Daerah Ketjamatan Djatinom kepada Bupati Kepala Daerah Klaten tertanggal 29 Desember 1965. Arsip Badan Kearsipan Kabupaten Klaten.

Koran

"Gerombolan Gestapu Lari kearah Gunung Merapi", *Sinar Harapan*, 15 November 1965.

"Warta Daerah", *Kompas* 27 Oktober 1965.

Sarjono, "sekali Lagi Gerpol di Djateng. Tangan² Kotor bergerajangan mendjelang subuh di Jon Dodikif 5 Klaten", *Kedaulatan Rakyat*, 4 Agustus 1966.

Sulastomo, "Apa yang Salah dengan G30S/PKI?" dalam *Kompas*, 31 Maret 2012.

"Rahasia Pembunuhan Massal Terbongkar", *Kompas* 17 November 1965.

Buku dan Karya Ilmiah

Abdurrachman, Sukri (pen). 2012. "Fakta dan Gagasan dari Lokakarya" dalam Taufik Abdullah dkk (ed), *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional. Bagian II Konflik Lokal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Anderson, Benedict ROG dan Ruth T. McVey. 2001. *Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Analisis Awal* (terjemahan). Yogyakarta: LKPSM Syarikat.

Brackman, Arnold C. 1969. *Indonesia: The Gestapu Affair*. California: American-Asian Educational Exchange.

Budiawan (ed). 2013. *Sejarah dan Memori: Titik Simpang dan Titik Temu*. Yogyakarta: Ombak.

Bustam, Mia. 2008. *Dari Kamp ke Kamp Cerita Seorang Perempuan*. Jakarta: Spasi dan VHR Book.

Connerton, Paul. "Seven types of forgetting" dalam *Memory Studies* 2008; 1; 59.

Cribb, Robert (ed). 2004. *The Indonesian Killings. Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (terjemahan Erika S. Alkhattab dan Narulita Rusli). Yogyakarta: Mata Bangsa bekerjasama dengan Syarikat Indonesia Yogyakarta.

Crouch, Harold. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia.* (terjemahan Th Sumarthana). Jakarta: Sinar Harapan.

Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro. 1977. *Sejarah Rumpun*

Diponegoro dan Pengabdiannya. Semarang: Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro bekerjasama dengan CV Borobudur Megah.

Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro. 1977. *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya*. Semarang: Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro bekerjasama dengan CV Borobudur Megah.

Ibrahim, Julianto. 2012. "Goncangan pada Keselarasan Hidup di Kesultanan" dalam Taufik Abdullah dkk (ed), *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian II Konflik Lokal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Khadiq. 2016. "Islam dan Komunisme: Gerakan Politik di Surakarta 1945-1966", *disertasi*, Universitas Gadjah Mada.

Lestari, Dewi Puji. 2009. "Peranan Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Operasi 'Pembersihan' PKI di Ceper Klaten Tahun 1965", *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nordholt, Henk Schulte, *et.al.* (ed), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, KITLV dan Pustaka Larasan, 2008.

Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada. 1982. *Laporan tentang Studi mengenai Keresahan Pedesaan pada Tahun 1960-an. Khususnya tentang Kasus Klaten, Banyuwangi dan Bali*. Jakarta: Yayasan Pancasila Sakti.

Pusat Penerangan Angkatan Darat. 1965. *Fakta2 Persoalan Sekitar 'Gerakan 30 September'*. Jakarta: Pusat Penerangan Angkatan Darat.

Pusat Penerangan Angkatan Darat. 1965. *Fakta² Persoalan Sekitar "Gerakan 30 September". Penerbitan No.1,2,3*. Jakarta: Pusat Penerangan Angkatan Darat.

Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal. Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (terjemahan Hersri Setiawan). Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1992. *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Soedjono, Imam. 2006. *Yang Berlawan. Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*. Yogyakarta: Resist Book.

Soerojo, Soegiarso. 1988. *Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai (G30S/PKI dan Apa Peran Bung Karno)*. Jakarta: PT Intermassa.

Tat, Oei Tjoe. 1995. *Memoar Oei Tjoe Tat. Pembantu Presiden Soekarno*. Jakarta: Hastra Mitra.

Wawancara dan transkrip wawancara

(Seluruh nama dalam wawancara merupakan nama samaran dan bukan nama sebenarnya. Pengubahan nama dilakukan untuk melindungi identitas asli narasumber)

Wawancara dengan Slamet Kendang, eks tapol Pulau Buru mantan anggota CGMI dari Kelurahan Somopuro Kecamatan Jogonalan, pada 12 Januari 2014.

Wawancara dengan Prayino, eks anggota Pemuda Marhaen dari Kelurahan Gondangan Kecamatan Jogonalan, pada 24 Oktober 2008.

Wawancara dengan Adipurwo, eks tapol Pulau Nusakambangan, bekas anggota HIS serta PGRI NV dari Kelurahan Sidowayah Kecamatan Klaten Kota, pada 25 Maret 2008.

Wawancara dengan Rasono, eks tapol bekas ketua IPPI desa Plawikan sekaligus wakil sekretaris IPPI Kecamatan Jogonalan, pada 12 Januari 2014 dan 22 Desember 2016.

Wawancara dengan Sumoharto, eks tapol mantan anggota PR Desa Gatak Kecamatan Delanggu pada 17-18 November 2016 dan 23 Mei 2017.

Wawancara dengan Samiko, eks anggota GAMKI dan Pemuda Marhaen dari Kelurahan Kraguman Kecamatan Jogonalan, pada 17 Oktober 2008 dan 11 Januari 2014.

Wawancara dengan Sanurmo, eks tapol pulau Buru bekas anggota Lekra dari Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Manisrenggo, pada 10 Oktober 2008.

Wawancara dengan Yanto Sumiryat, eks tapol bekas anggota PGRI N.V. dari Kelurahan Joton Kecamatan Jogonalan, pada 12 Januari 2014.

Transkip wawancara Octandi Bayu Pradana dengan Surjaki, bekas anggota Pemuda Marhaen dari Kecamatan Pedan, pada 24 Desember 2013.

Transkip wawancara Octandi Bayu Pradana dengan Suparnoto, bekas anggota Pemuda Marhaen dari Kecamatan Pedan, pada 24 Desember 2013.